

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA MELALUI UNIT USAHA DIGITAL PRINTING DI DESA TANIMULYA, KECAMATAN NGAMPRAH, KABUPATEN BANDUNG BARAT

Lena Nurhaliza¹

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa melalui unit usaha digital printing di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pemerintah desa, pengelola BUMDes, pegawai unit usaha digital printing, serta masyarakat pengguna jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dilaksanakan melalui pemberian modal usaha, pelatihan, pendampingan manajerial, penyediaan fasilitas usaha, bantuan pemasaran, pembukaan lapangan kerja, pembentukan struktur organisasi, serta pengawasan operasional usaha. Kegiatan ini memberikan manfaat berupa peningkatan keterampilan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, serta kontribusi terhadap pendapatan desa. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi bina manusia masih terdapat keterbatasan kemampuan pemasaran dan administrasi keuangan, pada bina usaha masih terdapat keterbatasan sarana prasarana serta perawatan peralatan, pada bina lingkungan pengelolaan limbah dan keselamatan kerja belum optimal, serta pada bina kelembagaan rapat koordinasi dan evaluasi belum dilaksanakan secara rutin. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usaha digital printing telah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pemberdayaan Ekonomi, Pemerintah Desa, BUMDes, Digital Printing

Abstract

This study aims to analyze community economic empowerment carried out by the village government through the digital printing business unit in Tanimulya Village, Ngamprah District, West Bandung Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation with informants consisting of the village government, BUMDes managers, employees of the digital printing business unit, and community members who use the services. The results show that empowerment is implemented

through the provision of business capital, training, managerial assistance, business facilities, marketing support, job creation, organizational structuring, and operational supervision. The activity contributes to improving community skills, creating local employment opportunities, and increasing village income. However, implementation has not been fully optimal. In the human development dimension, there are limitations in marketing skills and financial administration. In the business development dimension, limitations remain in facilities, infrastructure, and equipment maintenance. In the environmental development dimension, waste management and work safety are not yet optimal, while in the institutional development dimension coordination and evaluation meetings have not been conducted regularly. Therefore, this empowerment activity has been implemented but still needs improvement to achieve more optimal and sustainable outcomes.

Keywords: Economic Empowerment, Village Government, Bumdes, Digital Printing

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pembangunan desa memperoleh perhatian yang lebih besar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan untuk mengelola potensi serta sumber daya yang dimilikinya. Salah satu upaya untuk mendorong kemandirian ekonomi desa adalah melalui pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang dikelola secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Santi et al., 2025).

BUMDes memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian desa melalui pengelolaan berbagai unit usaha yang disesuaikan dengan potensi lokal. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat perekonomian desa secara mandiri. Dalam pengembangannya, BUMDes memerlukan strategi pemasaran yang tepat, khususnya pada unit usaha jasa seperti digital printing, guna memperluas jangkauan pasar dan membangun kepercayaan pelanggan di tingkat lokal maupun regional (Januarista & Kustiwa, 2024). Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua BUMDes dapat berjalan secara optimal. Beberapa BUMDes masih menghadapi

berbagai kendala, seperti keterbatasan dalam inovasi dan pengelolaan unit usaha yang masih belum optimal (Triyo et al., 2020).

Integrasi teknologi dalam unit usaha BUMDes sangat penting, karena digitalisasi menjadi faktor utama agar BUMDes mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal (Agustiawan et al., 2025). Optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui evaluasi program komprehensif juga diperlukan agar unit usaha, seperti digital printing, memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat (Firdaus, 2024). Peran aktif pemerintah desa dan masyarakat menjadi kunci, karena kolaborasi dalam penyediaan modal dan pelatihan dapat mengurangi kendala manajerial (Tegila et al., 2026). Dari aspek ekonomi, unit usaha yang inovatif terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli desa (Dewi et al., 2025). Dengan demikian, peningkatan kapasitas pengelola BUMDes melalui pendampingan yang berkelanjutan menjadi syarat penting agar unit usaha seperti digital printing dapat berjalan secara profesional dan mandiri (Suharto et al., 2026).

Salah satu bentuk inovasi usaha yang mulai berkembang dalam pengelolaan BUMDes adalah usaha berbasis jasa modern yang memanfaatkan teknologi digital, salah satunya usaha digital printing. Usaha digital printing memiliki peluang ekonomi yang cukup besar karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan percetakan yang cepat, praktis, dan berbasis teknologi. Selain memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa, usaha ini juga dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan serta penciptaan peluang kerja baru.

Desa Tanimulya yang berada di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu desa yang mengembangkan unit usaha digital printing melalui BUMDes sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Unit usaha digital printing ini didirikan untuk memberikan layanan percetakan bagi masyarakat desa sekaligus membuka kesempatan kerja bagi warga setempat. Dalam perkembangannya, unit usaha ini mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan

Asli Desa (PADes) serta membantu masyarakat memperoleh layanan percetakan tanpa harus pergi ke kota.

Meskipun demikian, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usaha digital printing di Desa Tanimulya belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek bina manusia masih terdapat keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, yaitu kemampuan dalam strategi pemasaran dan tidak tersedianya laporan keuangan pada periode pergantian pegawai. Pada aspek bina usaha masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, seperti mesin cetak stiker yang belum optimal, komputer yang mulai menunjukkan keterbatasan kinerja, serta belum adanya perawatan rutin pada mesin cetak. Pada aspek bina lingkungan pengelolaan limbah dan penerapan keselamatan kerja belum optimal. Selain itu, pada aspek bina kelembagaan rapat koordinasi dan evaluasi pengelolaan usaha belum dilakukan secara rutin.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan individu, tetapi juga mencakup penguatan aspek usaha, lingkungan, dan kelembagaan. Mardikanto & Soebiato (2019) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat meliputi empat dimensi utama, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usaha digital printing menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, serta manfaat yang diperoleh masyarakat dari keberadaan unit usaha tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan utama sebagai berikut: Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa melalui unit usaha digital printing di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa melalui unit usaha digital printing

serta mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa melalui unit usaha digital printing. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti secara langsung di lapangan dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, rekaman hasil wawancara dengan informan, foto-foto dokumentasi hasil penelitian, serta perangkat pendukung lain seperti laptop, ponsel, flashdisk, dan alat tulis yang digunakan untuk membantu proses pengumpulan dan penyimpanan data.

Objek penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usaha digital printing yang dikelola oleh BUMDes Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sedangkan subjek penelitian meliputi pemerintah desa, pengelola BUMDes, pengelola unit usaha digital printing yang terdiri dari kepala unit dan pegawai, serta masyarakat yang menggunakan jasa digital printing. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usaha digital printing.

Fokus penelitian mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat yang meliputi empat dimensi, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan sebagai indikator dalam menganalisis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Mardikanto & Soebiato, 2019). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan dengan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Data

yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usaha digital printing (Miles & Huberman, dalam Sugiyono, 2022).

PEMBAHASAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Dalam penelitian ini, pemberdayaan ekonomi masyarakat dilaksanakan melalui unit usaha digital printing yang dikelola oleh BUMDes Tanimulya. Pelaksanaan pemberdayaan tersebut dianalisis berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato yang mencakup empat dimensi, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan (Mardikanto & Soebiato, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tanimulya telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterampilan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan desa. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan proses pemberdayaan belum berjalan secara optimal.

Analisis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usaha digital printing di Desa Tanimulya dilakukan berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto & Soebiato (2019) yang meliputi empat dimensi, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan.

1. Bina Manusia

Bina manusia merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha secara mandiri. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi melalui unit usaha digital printing di Desa Tanimulya, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia, khususnya bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan unit usaha tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa memberikan pelatihan desain grafis serta pelatihan pengoperasian mesin digital printing kepada pegawai unit usaha. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pegawai sehingga mampu mengoperasikan peralatan digital printing secara optimal serta menghasilkan produk yang berkualitas. Setelah mengikuti pelatihan, pegawai mampu membuat desain yang lebih kreatif dan menarik serta dapat mengoperasikan mesin digital printing dengan lebih cepat dan tepat.

Selain pelatihan teknis, pemerintah desa juga memberikan pendampingan manajerial kepada pengelola unit usaha. Pendampingan ini meliputi bimbingan dalam penyusunan laporan keuangan serta pemberian arahan mengenai strategi pengembangan usaha. Kegiatan pendampingan tersebut membantu pengelola dalam memahami pengelolaan usaha secara lebih sistematis serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Kemampuan pegawai dalam memahami strategi pemasaran masih terbatas sehingga kegiatan promosi produk belum berjalan secara optimal. Selain itu, pada periode pergantian pegawai ditemukan bahwa laporan keuangan tidak tersedia, sehingga pencatatan administrasi keuangan tidak terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan unit usaha dapat berjalan lebih profesional dan berkelanjutan.

2. Bina Usaha

Bina usaha berkaitan dengan upaya pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat melalui dukungan permodalan, penyediaan fasilitas usaha, serta bantuan pemasaran guna mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha. Dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui unit usaha digital printing, pemerintah desa telah memberikan dukungan dalam bentuk bantuan modal usaha yang bersumber dari dana desa.

Modal awal yang diberikan sebesar Rp350.000.000 digunakan untuk pengadaan mesin digital printing, komputer, bahan produksi, serta penyediaan tempat usaha. Dalam perkembangannya, total akumulasi modal yang dialokasikan untuk pengembangan unit usaha ini mencapai sekitar Rp800.000.000 hingga Rp900.000.000. Dukungan modal tersebut menjadi faktor penting dalam menunjang keberlangsungan operasional unit usaha digital printing.

Selain bantuan modal, pemerintah desa juga menyediakan fasilitas tempat usaha yang memadai. Tempat usaha yang disediakan memiliki luas sekitar 70 m² dan berlokasi di dekat kantor desa sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan digital printing. Fasilitas tersebut memungkinkan proses produksi berjalan lebih efisien serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Selain dukungan permodalan dan fasilitas usaha, pemerintah desa juga memberikan bantuan dalam aspek pemasaran. Bantuan pemasaran dilakukan dengan cara memperkenalkan unit usaha digital printing kepada masyarakat serta kepada instansi pemerintahan di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Pemerintah desa juga menyampaikan informasi mengenai keberadaan layanan digital printing kepada masyarakat sehingga unit usaha tersebut lebih dikenal dan memiliki peluang untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana operasional masih perlu ditingkatkan. Beberapa peralatan, seperti mesin cetak stiker, belum dapat digunakan secara maksimal, sementara komputer yang digunakan mulai menunjukkan keterbatasan kinerja. Selain itu, perawatan rutin pada mesin cetak belum dilakukan. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kelancaran operasional usaha apabila tidak segera ditangani dengan baik.

3. Bina Lingkungan

Bina lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang mendukung kegiatan usaha masyarakat. Dalam konteks unit usaha digital printing di

Desa Tanimulya, keberadaan usaha ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Salah satu dampak yang paling terlihat adalah terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat desa. Unit usaha digital printing menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat yang bertugas sebagai kepala unit, bendahara dan administrasi, operator dan desainer, serta bagian finishing. Keberadaan lapangan kerja tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Selain itu, keberadaan unit digital printing juga memberikan kemudahan bagi masyarakat desa dalam memperoleh layanan percetakan. Sebelum unit usaha ini berdiri, masyarakat harus pergi ke kota untuk mencetak berbagai kebutuhan seperti spanduk, banner, atau undangan. Dengan adanya layanan digital printing di desa, masyarakat dapat memperoleh layanan percetakan dengan lebih cepat, mudah, dan terjangkau.

Namun demikian, dalam aspek lingkungan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pengelolaan limbah hasil produksi digital printing belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang tertulis. Selain itu, penggunaan alat pelindung diri oleh pegawai dalam proses produksi belum dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk memastikan bahwa kegiatan usaha digital printing tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

4. Bina Kelembagaan

Bina kelembagaan berkaitan dengan penguatan struktur organisasi serta sistem pengelolaan kelembagaan agar kegiatan usaha dapat berjalan secara profesional dan akuntabel. Dalam pelaksanaan pemberdayaan melalui unit usaha digital printing, pemerintah desa telah membentuk struktur organisasi BUMDes yang jelas.

Struktur organisasi tersebut terdiri dari penasehat, pengawas, direktur, sekretaris, bendahara, serta kepala unit-unit usaha termasuk unit digital printing. Pembentukan struktur organisasi ini bertujuan untuk

memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan usaha sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan lebih terarah.

Selain itu, pemerintah desa juga melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan usaha digital printing. Pengawasan dilakukan setiap bulan dan mencakup aspek operasional usaha, pengelolaan keuangan, serta kinerja pegawai. Melalui kegiatan pengawasan tersebut, pemerintah desa dapat memantau perkembangan usaha sekaligus memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi belum dilakukan secara rutin dan terjadwal. Kurangnya koordinasi yang intensif dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan usaha serta memperlambat proses pengambilan keputusan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam kegiatan operasional.

Secara keseluruhan, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usaha digital printing di Desa Tanimulya telah memberikan berbagai manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Kegiatan ini mampu meningkatkan keterampilan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Meskipun demikian, pelaksanaan pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala masih ditemukan pada aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana usaha, pengelolaan lingkungan kerja, serta koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan penguatan pada setiap aspek pemberdayaan agar unit usaha digital printing dapat berkembang secara lebih profesional, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa melalui unit usaha digital printing di Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat telah dilaksanakan melalui berbagai upaya yang meliputi pemberian modal usaha, pelatihan peningkatan keterampilan, pendampingan manajerial, penyediaan

sarana dan prasarana, bantuan pemasaran, pembukaan lapangan kerja, pembentukan struktur organisasi, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha. Upaya tersebut memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, seperti meningkatnya keterampilan kerja, terbukanya kesempatan kerja bagi warga desa, serta kontribusi terhadap pendapatan desa. Namun, pelaksanaan pemberdayaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam memahami strategi pemasaran serta belum tersedianya laporan keuangan pada periode pergantian pegawai sehingga pencatatan administrasi keuangan tidak berkelanjutan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana operasional, seperti mesin cetak stiker yang belum dapat digunakan secara optimal, komputer yang mulai menunjukkan keterbatasan kinerja, serta belum adanya perawatan rutin pada mesin cetak. Pada aspek lingkungan kerja, pengelolaan limbah dan penerapan keselamatan kerja juga belum optimal karena belum tersusunnya SOP pengelolaan limbah secara tertulis serta belum konsistennya penggunaan alat pelindung diri dalam kegiatan operasional. Di sisi kelembagaan, pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi juga belum dilakukan secara rutin dan terjadwal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan pengelolaan usaha, serta penguatan koordinasi kelembagaan agar unit usaha digital printing dapat berkembang secara lebih profesional, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, Samsiah, S., Suriyanti, L., Ramashar, W., Fionasari, D., Putra, R., & Lawita, N. (2025). PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA MELALUI E-COMMERCE: SOSIALISASI DAN PELATIHAN UNTUK OPTIMALISASI PERAN BUMDES DI ERA DIGITAL. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, 68-73.
- Dewi, R., Rowa, H., & Dione, F. (2025). PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI

KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, 94-105.

- Firdaus, M. R. (2024). Evaluasi Program BUMDes Digital Printing Tanimulya Menggunakan Model CIPP: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Potensi Ekonomi Lokal. *JAPPA: Jurnal Andragogi Pedagogi dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Januarista, A., & Kustiwa, A. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Strategi Pemasaran Di Bidang Digital Printing Di Desa Cicangkang Hilir, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. *Economics and Digital Business Review*, 876-883.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Santi, M., Firdaus, E., & Diana, L. (2025). IMPLEMENTASI PASAL 89 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LANGKAT KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 166–184.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, R., Amalia, S., Roy, J., & Busari, A. (2026). Penguatan Kapasitas BUMDes Dalam Mengelola Potensi Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 22759-22770.
- Tegila, L., Bumulo, S., & Hatu, D. (2026). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bumdes Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5233-5248.
- Triyo, E., Haryono, & Irwantoro. (2020). Strategi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi pada BUMDes Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik). *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 172-182.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.